



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 7 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT

I. DATA PRIBADI

1. Nama : AGUSTINUS MAUN
2. Jabatan : KEPALA KANTOR
3. NHK : 431561

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **8.408.450.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 45 m2/35 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA UTARA , HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
2. Tanah Seluas 1.500 m2 di KAB / KOTA KOTA BITUNG , HASIL SENDIRI Rp. 1.650.000.000
3. Tanah Seluas 12.110 m2 di KAB / KOTA MALUKU TENGAH, HASIL SENDIRI Rp. 1.211.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 170 m2/146 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 4.650.000.000
5. Tanah Seluas 569 m2 di KAB / KOTA KOTA BITUNG , WARISAN Rp. 597.450.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **659.000.000**

1. MOBIL, TOYOTA INNOVA VENTURER/MINIBUS Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 489.000.000
2. MOBIL, TOYOTA TRUCK NEW DYNA Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 115.000.000
3. MOBIL, TOYOTA SEDAN CORONA Tahun 1996, HASIL SENDIRI Rp. 55.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp.** **282.300.000**

D. SURAT BERHARGA **Rp.** **---**

E. KAS DAN SETARA KAS **Rp.** **1.856.052.109**



F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 11.205.802.109

III. HUTANG

Rp. 1.500.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 9.705.802.109

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.